

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan akan berfokus pada pengaruh terpaan pemberitaan *online* pelaksanaan PPKM terhadap opini masyarakat Jawa dan Bali mengenai pelaksanaan PPKM. Teori menurut Harold D. Lasswell dalam (Moerdijati, 2016, pp. 91–92) mengungkapkan bahwa didalam setiap proses komunikasi, akan secara langsung memunculkan efek ataupun pengaruh. Pada teori tersebut mengungkapkan bahwa dalam setiap proses komunikasi akan memberikan efek baik kepada pendengar, pembaca, maupun penonton. Lasswell mengemukakan bahwa penggambaran komunikasi akan menjawab ungkapan verbal yakni “*Who – Says What – In Which Channel – To Whom – With What Effect?*”. Proses komunikasi yang penyampaiannya dilakukan oleh seorang komunikator menggunakan media ke komunikan, akan memunculkan efek tertentu.

Terdapat lima elemen dari komunikasi yaitu *Souce* (Sumber atau Komunikator), *Message* (Pesan), *Channel* (Saluran ataupun medianya), *Receiver* (Penerima atau Komunikan), serta *Effect* (Dampak) (Mulyana, 2016, pp. 69–71). Pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam penelitian ini adalah pada terpaan pemberitaan *online* mengenai pelaksanaan “PPKM”. Pemberitaan pesan tersebut akan disebarkan melalui sebuah media *online* yang ditujukan untuk komunikannya.

Kemudian, mengetahui efek apa yang ditimbulkan oleh komunikasi setelah selesai membaca berita yang berkaitan dengan hal tersebut pada media *online*.

Terdapat tiga jenis efek komunikasi massa, yaitu efek kognitif (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu), efek afektif (perubahan sikap seseorang), dan konatif (tingkah laku seseorang). Melalui terpaan pemberitaan tersebut akan membuat komunikasi menerima banyak informasi dan pengetahuan mengenai pemberitaan pelaksanaan PPKM. Penelitian ini akan fokus kepada efek konatif pada respon setelah membaca pemberitaan mengenai pelaksanaan PPKM melalui media *online*. Menurut John R. Bittner dalam Nurudin (2014, p. 211) menjelaskan bahwa yang menjadi fokus dalam efek konatif ialah bagaimana media tidak hanya dapat mempengaruhi pembaca, namun sampai pada titik bagaimana media dapat membuat pembaca memberikan reaksi maupun respon-respon terhadap pemberitaan tersebut. Respon tersebut akan membentuk opini pada masyarakat yang membaca pemberitaan pelaksanaan PPKM.

Opini merupakan sebuah pendapat dari seseorang terhadap sesuatu yang mampu menarik perhatian serta minatnya (Soemirat & Yehuda, 2016, p. 3). Adapun menurut Sunarjo dalam (Rahmawati et al., 2013), opini merupakan jawaban lisan dari individu yang telah memberikan sebuah respon (tanggapan) kepada stimulus (rangsangan) yang ada pada suatu keadaan pada umum dan kemudian mengajukan suatu pertanyaan. Opini merupakan reaksi pertama ketika seseorang mempunyai perasaan yang ragu-ragu terhadap suatu masalah yang berbeda dari kebiasaan, serta ada

penilaian pada suatu persoalan yang menjadikan seseorang memperselisihkan permasalahan tersebut. Terdapat tiga faktor pembentuk opini yaitu *affect*, *behavior* dan *cognition* (Ruslan, 2016, pp. 68–69).

Pembentukan sebuah opini tidak serta merta muncul begitu saja, tentunya terdapat pengaruh dari media massa. Menurut buku *Jurnalistik Terapan* (Yunus, 2012, p. 27) menjelaskan bahwa media massa merupakan sebuah sarana atau sebagai alat berkomunikasi yang menjadi media menyalurkan publikasi berita ke semua khalayak. Salah satu bagian dari media masa yang dapat perhatian serta dapat menggiring opini dari masyarakat ialah berita. Menurut McQuail dalam (Nugraheni & Purnama, 2013) pula mengatakan bahwa media massa kerap kali dianggap selaku alat kekuasaan yang efisien sebab mampu melaksanakan sebagian dari perihal yang menarik serta memusatkan atensi, membujuk komentar serta asumsi, pengaruhi opsi dari perilaku, membagikan status dan juga legitimasi, serta mampu membentuk suatu opini dari masyarakat.

Media massa dianggap sebagai penyebaran sumber informasi untuk menyebarkan dan pembentuk opini. Pada *Jurnal International* (Christen & Huberty, 2007) menjelaskan bahwa terpaan liputan pemberitaan selain menginformasikan secara langsung, juga memiliki pengaruh dalam opini publik secara tidak langsung. Menurut Xiong dalam (Aldilal et al., 2020) penggunaan media akan menjadi sebuah agen informasi yang efektif dan sangat kuat apabila disebarakan menggunakan komunikasi virtual atau berbasis online. Seiring dengan penggunaan media massa yang semakin

meluas, internet juga mengalami perkembangan yang mempermudah penggunaanya dalam mendapatkan sebuah informasi dengan cepat dan juga mudah diakses (Yanti & Rusdi, 2019).

Terpaan media menurut Rosengren dalam Kriyantono (2014, p. 209) dapat dioperasionalkan menjadi jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis media, isi berita media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media keseluruhan. Pada penelitian ini, khalayak mendapatkan terpaan pemberitaan yang merupakan hasil dari media massa. Menurut Yunus (2012, p. 45) berita merupakan sebuah informasi yang dapat dikonsumsi dan dibutuhkan oleh pembaca karena memuat informasi dan juga pesan penting yang mampu menarik perhatian pembaca.

Menurut Bleyer dalam (Fajar & Restivia, 2011) menjelaskan bahwa berita merupakan sesuatu yang bermassa yang diseleksi oleh wartawan agar dapat dimuat didalam sebuah media, sebab berita itu mampu menarik atensi maupun memiliki arti bagi khalayak dan juga bisa menarik khalayak guna menjajaki berita tersebut. Berita dapat disebut sebagai hasil dari laporan dari terjadinya suatu peristiwa pada keadaan yang umum dan baru kejadian, kemudian disampaikan melalui media massa (Muzakkir, 2020, p. 62). Terdapat lima elemen dalam berita yaitu *timeliness*, *proximity*, *prominence*, *consequence* dan *human interest* (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2017, pp. 61–64).

Ketika masyarakat mengonsumsi sebuah berita melalui media massa, hal tersebut membuat opini yang tercipta di masyarakat juga beragam dan berbeda. Opini yang di timbulkan dapat berupa opini positif atau sebagai pernyataan persetujuan terhadap berita tersebut. Namun, disisi lain ada juga opini negatif yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap berita tersebut. Maka dari itu, *public opinion* akan terbentuk jika khalayak diterpa sebuah isu yang disebarakan melalui media massa. Dapat melalui televise, majalah, surat kabar, film dalam media massa (Tamburaka, 2013, pp. 101–102).

Salah satu permasalahan yang sedang dialami oleh berbagai negara ialah Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease-2019*) yang terjadi karena disebabkan dari virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) hingga saat ini masih menjadi peristiwa yang mengancam pada kesehatan masyarakat dan menjadi perhatian di belahan dunia. Sampai hari ini pun, virus ini mengalami peningkatan pada jumlah korbannya.

Gambar I.1
Data Peningkatan COVID-19



Sumber : Antaranews.com

Sejak terjadinya Covid-19 pada 2 Maret 2020 saat itu, hingga kini jumlah positif dari virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) terus bertambah khususnya di Negara Indonesia. Jumlah peningkatan ini terjadi sejak bulan Juni 2021, dimana Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19. Hingga pada 30 Juni 2021, menjadi puncak kasus baru karena mencapai 21.807 kasus yang merupakan rekor tertinggi dari kasus yang terjadi pada awal tahun. Peningkatan ini diduga karena mobilitas masyarakat yang tinggi pada bulan Mei karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian dikarenakan perilaku masyarakat yang tidak tertib dengan mengabaikan protokol kesehatan. Banyak aktivitas yang membuat kerumunan, tidak menggunakan masker berlapis dan juga tidak menjaga jarak. Faktor yang terakhir adalah dikarenakan adanya varian virus corona terbaru. World Health Organization (WHO) telah menemukan empat varian yang dapat dikatakan dengan varian yang lebih ganas dari yang lainnya, yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta (Visioncorporation.co.id).

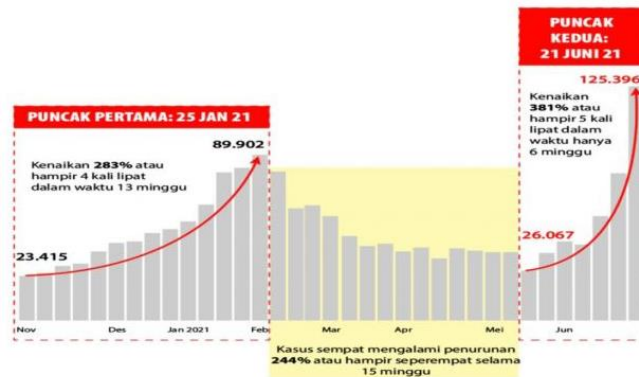
Pada awal masa pandemik, pemerintah telah merumuskan laju peningkatan beberapa kebijakan guna memutuskan laju peningkatan kasus positif Covid-19. Merujuk pada hal ini dan mengingat setelah liburan tahun baru laju penambahan kasus positif Covid-19 di beberapa provinsi meningkat, maka pemerintah kembali merumuskan kebijakan baru yang kita kenal dengan sebutan PPKM.

Penelitian ini memilih subjek yaitu masyarakat wilayah Jawa dan Bali yang membaca pemberitaan pelaksanaan PPKM pada media *online* Detik dan Kompas. Kedua wilayah tersebut peneliti pilih karena program pemerintah memfokuskan

pelaksanaan pada wilayah Jawa dan Bali, sehingga pemberitaan pelaksanaan tersebut dekat dengan subjek peneliti. Apalagi wilayah Bali merupakan destinasi wisata dunia, sehingga dengan adanya pelaksanaan PPKM berdampak pada perekonomian masyarakat Bali, yang mana mayoritas masyarakat menggantungkan mata pencahariannya di sektor pariwisata dan penurunannya sangat hebat (CnnIndonesia.com). Pada perekonomian di wilayah Jawa juga mengalami penurunan. Pendapatan rumah tangga di Ibu kota menurun 1,84 persen dan tenaga kerja berkurang sebanyak 2 persen. Dampak pelaksanaan PPKM Jawa dan Bali juga mencangkup pada sektor bisnis akomodasi, restoran dan transportasi (Ekonomi.bisnis.com).

Berdasarkan data yang peneliti temukan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), berbagai provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada sektor kritikal, esensial dan non esensial sebesar 24,66 persen pekerja berpotensi di PHK dan 23,72 persen dirumahkan (Katadata.co.id). Pemerintah memilih wilayah Jawa dan Bali dalam program PPKM dikarenakan kedua wilayah tersebut mewakili sekitar 66,7 persen dari keseluruhan total kasus Covid-19 secara nasional. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan PPKM yang berlaku mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. (Kabar24.bisnis.com). Oleh sebab itu peneliti memfokuskan subjek pada wilayah Jawa dan Bali untuk mengetahui dan menemukan jawaban dari pengaruh terpaan pemberitaan *online* pelaksanaan terhadap opini masyarakat Jawa dan Bali mengenai PPKM.

Gambar I.2
Grafik Lonjakan Covid-19



Sumber : MediaIndonesia.com

Dengan adanya pandemi gelombang kedua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuat peraturan terbaru mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. PPKM darurat diadakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Hal tersebut dilakukan dikarenakan banyak masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 yang semakin tidak terkendali dan rumah sakit yang tidak mampu menampung pasien. Berdasarkan pertimbangan Presiden, lonjakan terjadi karena adanya varian virus baru yaitu Delta yang enam kali lebih cepat menular. Hal tersebut mengakibatkan kasus aktif di Indonesia hingga 228 ribu kasus. Padahal, sebelumnya telah turun hingga 176 ribu pada awal Februari 2021 dan menjadi 87 ribu kasus pada pertengahan Mei 2021 (MediaIndonesia.com).

Tak kunjung usai, pemerintah telah meresmikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan level yang dimulai tanggal 21 Juli hingga 16 Agustus 2021. Setiap wilayah akan dikategorikan sesuai dengan level yang

berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan intruksi yang diresmikan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 mengenai PPKM level empat, diadakan di wilayah Jawa dan Bali (Cnbcindonesia.com). Dengan adanya kebijakan pemerintah, PPKM level empat yang diadakan di Jawa dan Bali telah di perpanjang mulai tanggal 17 hingga tanggal 23 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM Jawa dan Bali tentunya memiliki alasan sendiri, yaitu adanya penurunan kasus. Kasus yang telah terkonfirmasi dikabarkan turun hingga 76 persen pada data terakhir yaitu tanggal 15 Agustus. Angka tersebut lebih besar dari pengumuman PPKM Level 4 pada minggu lalu yaitu sebesar 59 persen (Bisnis.tempo.co).

Gambar I.3

Wilayah dan Aturan PPKM



Sumber : Akun Instagram @Perupadata

Keputusan perpanjangan PPKM Level di Jawa dan Bali telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan telah membagi wilayah tersebut pada level 4, 3 dan 2 hingga 23 Agustus 2021. Dengan adanya perbedaan level, tentu saja memiliki aturan yang berbeda.

Varian Omicron terkonfirmasi telah masuk di Indonesia pada akhir tahun 2021 pada salah satu pekerja rumah sakit di Wisma Atlet, Jakarta. Pasien tersebut terdeteksi pada 15 Desember 2021 (news.detik.com). Hingga awal tahun 2022, Omicron mengalami lonjakan. Sehingga, PPKM Jawa-Bali resmi di perpanjang. Hal tersebut membuat adanya dugaan gelombang baru Covid-19 yang akan terjadi. Penambahan kasus Covid-19 setiap harinya bertambah lebih dari 10.000 kasus. Padahal selama bulan Desember 2021 hingga pertengahan bulan Januari 2022 total kasus harian dibawah angka 100 kasus (Kompas.com). Kasus Omicron masih tetap didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali, terutama pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten (bali.tribunnews.com).

Perpanjangan PPKM Jawa dan Bali dibedakan pada level 1, 2, dan 3. PPKM level 1 ditetapkan di 40 kabupaten/kota. Sementara untuk level 2 ditetapkan di 86 Kabupaten/Kota. Untuk level 3, sementara ini hanya ditetapkan di 2 Kabupaten/Kota (tribunnews.com). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri, penetapan PPKM level tidak hanya berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Namun, terdapat penambahan indikator terbaru. Penurunan

level 3 menjadi level 2 apabila Kabupaten/Kota mencapai total vaksinasi dosis 2 minimal sebanyak 50% dan vaksinasi dosis 2 pada lanjut usia diatas 60 tahun minimal sebesar 40%. Kemudian untuk penurunan level 2 menjadi level 1 apabila Kabupaten/Kota mencapai total vaksinasi dosis 2 minimal sebanyak 70% dan vaksinasi dosis 2 pada lanjut usia diatas 60 tahun minimal sebesar 60% (news.detik.com).

Gambar I.4

Pro Kontra Perpanjangan PPKM



Sumber : kompasiana.com dan detik.com

Dengan adanya kebijakan PPKM, tentu saja pemberitaan ini menjadi perbincangan bagi masyarakat ketika mengetahui PPKM akan diperpanjang. Adanya pro dan kontra dengan permasalahan ini. Masyarakat beropini bahwa mereka keberatan dengan adanya pelaksanaan PPKM karena mempengaruhi pekerjaan mereka. Namun, ada juga masyarakat yang merasa dengan adanya perpanjangan PPKM akan menurunkan jumlah kasus Covid-19 yang sedang melonjak. Penutupan jalan berimbas

kepada ojek *online*, tenaga kesehatan, pegawai swalayan dan lainnya. Masyarakat ingin pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi penerapan PPKM darurat tersebut. Selama PPKM berjalan, ternyata banyak masyarakat yang tersiksa akibat laju ekonomi yang semakin melemah, tidak seharusnya pemerintah melarang dan membatasi mobilitas penduduk saja namun memberikan solusi dan bantuan demi keberlangsungan kehidupan mereka (Kompasiana.com).

Ada juga netizen yang meluapkan opininya melalui cuitan di Twitter. Ketika terjadinya pengumuman bahwa diadakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021 khusus Jawa dan Bali langsung membuat riuh netizen. Dipantau oleh detikINET, pemberitaan PPKM menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Terdapat 42.100 ribu tweet mengenai PPKM yang terbagi antara pro dan kontra. Ada netizen yang setuju dengan adanya PPKM darurat namun menganggap bahwa masyarakat masih keras kepala dengan mengabaikan proses yang seharusnya ditertibkan. Namun, bagi pihak kontra mereka menjadi ketakutan bahwa kondisi kehidupan mereka akan menjadi lebih sulit (DetikINET.com).

Gambar I.5

Berita Terkait Setuju dengan Perpanjangan PPKM Jawa dan Bali



Sumber : News.detik.com

Beberapa oknum menyetujui dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan agar PPKM darurat diperpanjang 6 minggu. Kemudian Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman juga setuju untuk PPKM darurat di perpanjang hingga Agustus. Berdasarkan wawancara yang dilakukan melalui pesan suara Dicky Budiman mengatakan, “Sudah seminggu ini PPKM darurat belum efektif yang signifikan untuk menurunkan infeksi, kematian maupun angka reproduksi dan juga pertumbuhannya, jadi setidaknya PPKM darurat di perpanjang hingga akhir Agustus.” (News.detik.com)

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah juga menyetujui perpanjangan PPKM dikarenakan mampu menekan kasus positif virus Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah yang bernama Yulianto Prabowo memberikan opininya bahwa

telah ada perubahan perilaku masyarakat saat PPKM pertama namun jumlahnya memang belum banyak sehingga siap untuk melaksanakan PPKM selanjutnya (News.detik.com).

Gambar I.6

Berita Terkait Penolakan dengan Perpanjangan PPKM Jawa dan Bali



Sumber : Detik.com, Kompas.TV

Perpanjangan pelaksanaan PPKM membuat masyarakat resah. Mereka menggelar aksi penolakan PPKM yang berada di Bandung. Pedemo yang merupakan gabungan dari ojek *online*, pedagang dan juga mahasiswa melakukan orasinya di depan Kantor Wali Kota Bandung dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Tolak PPKM'. Salah satu *driver* ojol merasa mereka banyak kehilangan pendapatan dikarenakan banyaknya jalan yang ditutup sehingga pendapatan mereka habis untuk membeli bensin. Kemudian ada pedagang dari Bandung Electronic Center yang kehilangan pendapatan karena penutupan mal (news.detik.com). Puluhan mahasiswa

di Bali juga ikut melakukan aksi demonstrasi karena membuat pedagang serta sektor kehilangan penghasilan namun tidak ada penanganan dari pemerintah (Kompas.com)

Meskipun telah diberlakukannya pembatasan, namun laju penularan virus Covid-19 tetap tinggi. Banyak warga menyuarkan keluh kesahnya ke presiden. Hal tersebut rupanya ditanggapi oleh Presiden Jokowi. *“PPKM darurat merupakan semi lockdown. Meskipun masi semi, rupanya waktu saya masuk ke kampung dan kedaerah semua minta dibuka.”* Kata Jokowi pada acara pemberian banpres produktif untuk usaha mikro di halaman Istana Merdeka (Nasional.kompas.com). Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh Aliansi Pedagang Bandung di depan Pasar Baru Bandung. Mereka merasa keberatan dengan adanya PPKM Darurat. *“Ada isu bantuan, namun hingga detik ini bantuan tersebut belum ada diberikan untuk para pedagang. Dampak dari PPKM ini berupa kemiskinan dan kelaparan yang bahkan lebih berbahaya,”* opini Ari di lokasi aksi (News.detik.com).

Lembaga Fixpoll Indonesia melakukan survei mengenai kebijakan PPKM. Pada hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 43,2 persen responden tidak setuju dengan adanya PPKM. Kemudian sebanyak 9,8 persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Apabila hasil tersebut dijumlah, sebanyak 53 persen responden tidak setuju dengan kebijakan ini. Namun, sebanyak 23,2 persen responden setuju dengan adanya PPKM dan 2,2 persen responden menyatakan sangat setuju dengan kebijakan PPKM (Republika.co.id).

Pada sebuah survey yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melewati survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2017 yang kemudian diolah oleh Lokadata *Baritagar.id* tersebut memberikan kesimpulan bahwa sepertiga penduduk yang ada di Indonesia menggunakan internet. Pada pembaca berita secara daring atau *online* yang berada di Indonesia telah meningkat sebanyak 35,8 persen jika dibandingkan dengan data pada dua tahun yang lalu, yakni menjadi 50,7 juta orang. Dari semua total pengakses internet, terdapat sebanyak 65,9 persen yang telah mengakses berita atau terdapat sebanyak 50,7 juta orang (*Beritagar.id*). Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian pada pemberitaan menggunakan media *online* mengenai berita yang terkait dengan kasus covid yang memang sangat banyak, bahkan selalu update setiap harinya.

Gambar I.7

Data Pemanfaatan Internet Bidang Edukasi

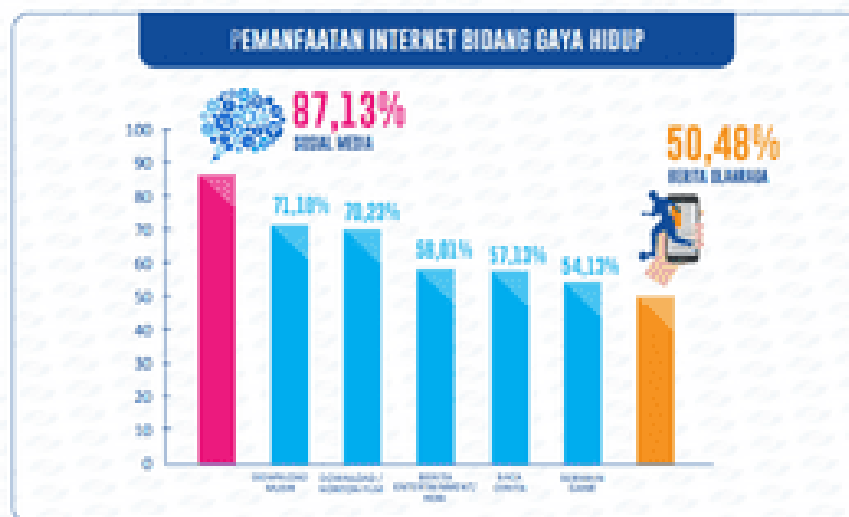


Sumber : APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Dari data yang tertera di atas, ditunjukkan bahwa minat membaca artikel sangatlah tinggi, yakni sebesar 55,30%. Berita mengenai Covid-19 khususnya, telah banyak di sebarkan di berbagai portal media seperti pada Kompas.com dan Detik.com

Gambar I.8

Data Pemanfaatan Internet Bidang Edukasi



Sumber : APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Selain itu, dari data survey pada tahun 2017 yang ditulis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) yang membahas mengenai pemanfaatan dari internet pada bidang gaya hidup, tertera sebesar 87,13% diduduki oleh pengguna Sosial Media. Dari data yang telah dimuat dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia memanfaatkan internet untuk dapat membaca berita. Tak hanya dimuat dalam berita *online*, pada data yang telah dijelaskan diatas, pemberitaan mengenai PPKM juga dimuat dalam media sosial. Seperti pada media sosial Instagram, Youtube dan juga LINE Today.

Berdasarkan sumber dari Kompas.com, menginformasikan bahwa semenjak adanya pandemi Covid-19, produktivitas dari berita media online mengalami peningkatan yang tajam jika dibandingkan pada tahun 2019. Alasan peneliti memilih pemberitaan dikarenakan jumlah pemberitaan mengenai Covid-19 mulai dari 1 Januari hingga 15 Desember 2020 sebanyak 5.465.266 berita. Jika dibandingkan antara media cetak dan juga media *online*, pemberitaan mengenai Covid-19 yang tertinggi adalah disebarkan melalui media *online* (Regional.kompas.com).

Penelitian ini menggunakan media *online* dari Kompas dan Detik. Kedua media *online* masuk kedalam portal media online terbaik di Indonesia (Akudigital.com). Kemudian, berdasarkan riset *Alinea.id*, pemberitaan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali mengalami peningkatan yang signifikan pada tanggal 6-7 Januari 2021 Kompas dan Detik memberitakan pemberitana mengenai PPKM sebanyak 78 pemberitaan (*Alinea.id*). Sehingga, peneliti menggunakan media *online* Kompas dan Detik sebagai media penyebaran pemberitaan pelaksanaan PPKM.

Penelitian ini tentunya menggunakan jurnal terdahulu sebagai referensi dan pembeda. Pertama dari Jurnal Koneksi dengan judul "*Pengaruh Terpaan Media Berita Hoax di Instagram terhadap Opini Masyarakat Milenials Akan Sumber Berita*" karya Jason Roy dan Ahmad Junaidi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari terpaan berita hoax dan opini masyarakat. Masyarakat milenial menghasilkan opini mereka melalui terpaan berita hoax dengan baik dalam pemilihan berita yang mereka

konsumsi. Persamaan dari jurnal ini adalah pada objek dan pada metode yaitu sama-sama menggunakan metode survei. Namun tentunya terdapat perbedaan pada indikator objek opini. Dalam jurnal ini memilih indikator kepercayaan, nilai dan pengharapan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator *Affect* (perasaan), *Behavior* (tingkah laku) dan juga *Cognition* (pemahaman).

Perbandingan yang kedua adalah pada Jurnal Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi dengan judul "*Pengaruh Terpaan Pemberitaan Sandiaga Uno di Media Online Terhadap Sikap Masyarakat*" karya Indri Ahsanu Amala dan Rini Riyantini. Berita mengenai Sandiaga Uno sebagai calon kandidat Capres dan Cawapres sempat menjadi sorotan media. Berita tersebut sempat mendapat tanggapan negatif dari beberapa politisi dan tokoh agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari terpaan pemberitaan mengenai Sandiaga Uno yang dikonsumsi melalui media *online* terhadap sikap masyarakat. Kemudian yang menjadi pembeda adalah pada variabel (Y) yaitu sikap sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel opini.

Perbandingan yang ketiga adalah pada Jurnal Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi dengan judul "*Pengaruh Terpaan Pemberitaan Di Media Online Dan Word Of Mouth Communications Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Mengurangi Penggunaan Plastik Saat Berbelanja*" karya Ilona Vicenovie Oisina Situmeang. Pemberitaan mengenai bahaya sampah plastik diharapkan menjadi sebuah informasi yang diterapkan oleh masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan

masyarakat mengenai bahaya limbah plastik bagi lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara terpaan pemberitaan di media *online* dan juga *Word of Mouth Communications* terhadap keputusan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik ketika berbelanja. Penelitian ini memiliki perbedaan Variabel (X) yaitu menggunakan indikator penggunaan media, jenis media, frekuensi penggunaan, dan durasi penggunaan. Kemudian variabel (Y) pada penelitian tersebut menggunakan variabel pengambilan keputusan.

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh dari terpaan pemberitaan *online* pelaksanaan PPKM terhadap opini masyarakat Jawa dan Bali mengenai pelaksanaan PPKM?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari terpaan pemberitaan *online* pelaksanaan PPKM terhadap opini masyarakat Jawa dan Bali mengenai pelaksanaan PPKM.

I.4. Batasan Masalah

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan dalam fenomena sebelumnya. Maka dari itu, peneliti akan membuat batasan di penelitian ini, yakni :

- a. Objek dari penelitian ini yakni pengaruh terpaan pemberitaan *online* mengenai pelaksanaan PPKM terhadap opini masyarakat Jawa dan Bali mengenai pelaksanaan PPKM.

- b. Subjek dari penelitian ini yakni masyarakat Jawa dan Bali yang membaca pemberitaan *online* pelaksanaan PPKM pada portal berita Detik dan Kompas. .
- c. Metode untuk menggumpulkan data pada penelitian ini yakni menggunakan metode survei melalui instrumen berupa kuesioner *online*.
- d. Tempat penelitian ini berada di wilayah Jawa dan Bali.

I.5. Manfaat Penelitian

I.5.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini mampu memperkaya dan juga menambah referensi penelitian Ilmu Komunikasi khususnya pada kajian pengaruh terpaan pemberitaan *online* dan juga opini dalam medium komunikasi massa.

I.5.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, akan menjadi masukan untuk pemerintah agar dapat menerima masukan dari masyarakat dan juga dapat mengatasi masalah yang ada.